



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jend. Ahmad Yani kavling 58 (bypass) Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website: <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>

Jakarta, 17 Mei 2022

Nomor : 287/DJU.2/PP.00.4/5/2022
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pemanggilan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022

Yth. : Hakim, Panitera, Panitera Muda Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ternate,
Jaksa Wilayah Ternate, Polres Ternate Kota yang namanya
tersebut dalam lampiran ini.

Sehubungan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, dimohon Saudara untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 akan dilaksanakan pada tanggal **07 Juni s.d 09 Juni 2022**.
 - a. **Tempat** : Sahid Bela Hotel Jl. Jati Raya No.500, Jati, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara
 - b. **Waktu**
 - **Check in** : Selasa, Pukul 14.00 WIT s.d 16.00 WIB
 - **Pembukaan** : Selasa, Pukul 19.30 WIT s.d Selesai
 - **Penutupan** : Kamis, Pukul 10.30 WIT s.d Selesai
2. **Pakaian:**
 - a. Pakaian Batik Lengan Panjang (untuk acara malam hari); dan
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH).
2. **Wajib Menyerahkan:**
 - **Tiket Pesawat ekonomi** dan **boarding pass pergi - pulang** (PP) **YANG SAH** dari Tempat tugas/kedudukan ke tempat penyelenggaraan dan kembali ketempat kedudukan semula, bagi peserta yang menggunakan transportasi udara yang disertai **nominal harga**.
 - **Tiket kapal laut/bus** bagi peserta yang menggunakan transportasi laut atau bus harus disertai **nominal harga tiket**.
 - **Bagi peserta yang menggunakan kendaraan pribadi** diharap melampirkan **Bon Pengisian BBM**.
 - **Surat Keterangan** yang menyatakan dibebaskan dari tugas sehari-hari selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum;
3. **Konfirmasi kehadiran dan registrasi** peserta paling lambat tanggal 31 Mei 2022 dengan melakukan registrasi melalui : <https://bit.ly/bimtekRJ2>. Hal-hal lainnya yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 - Bypass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat Telp (021) 29079176 pswt 1511.
Contact Person :HP. 08161427335 (M.Rifa'i), 085782479899 (Tietie)
Email: pengembanganbadilum@gmail.com

Atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
DIREKTUR
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum


Dr. LUCAS PRAKOSO., S.H., M. Hum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NOMOR : 29/DJU.2/SK/PP.00.4/5/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan pelaksanaan tugas Pengadilan serta mewujudkan kemampuan di bidang yudisial maka diperlukan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk itu perlu menunjuk para peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif yang namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
18. Surat Edaran Bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia, dan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08HM.03.02tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
19. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Nomor 170/SEK/SK/III/2018;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2022 tanggal 17 Nopember 2021;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022.

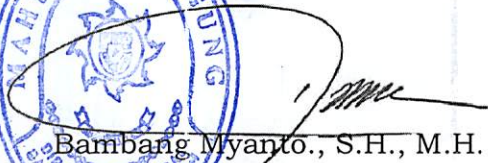
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**
- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal **7 Juni s.d 9 Juni 2022**.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2022 tanggal 17 November 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 18 Mei 2022

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto., S.H., M.H.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Plt Direktur Jenderal Peradilan Umum
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
6. Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 NOMOR : 29/DJU.2/SK/PP.00.4/5/202239
 TANGGAL : 18 Mei 2022

DAFTAR PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
 PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)
 DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM

NO.	NAMA	GOL/ RG	JABATAN	L/P	SATKER
1	2	3	4	5	6
1	Dr. JONNER MANIK, SH., MM NIP. 19601206 198803 1 004	IV/e	HAKIM PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU UTARA
2	SURUNG SIMANJUNTAK, SH., M.Hum NIP. 19610822 198803 1 002	IV/e	HAKIM PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU UTARA
3	Dr. JONLAR PURBA, SH., MH NIP. 19620523 198803 1 004	IV/e	HAKIM PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU UTARA
4	GANJAR PASARIBU, SH, MH NIP. 19600330 198612 1 001	IV/e	HAKIM PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU UTARA
5	SISWATMONO RADIANTORO, S.H. NIP. 19610924 198803 1 007	IV/e	HAKIM PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU UTARA
6	ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH, MH NIP. 19600516 199103 1 003	IV/d	HAKIM PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU UTARA
7	DWI PURWADI, S.H., M.H. NIP. 19610423 198603 1 003	IV/d	HAKIM PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU UTARA
8	AISA HI MAHMUD, S.H., M.H. NIP. 19611219 198503 2 004	IV/d	HAKIM PT MALUKU UTARA	P	PT MALUKU UTARA
9	ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H. NIP. 19671123 199603 1 001	IV/c	KETUA PN TERNATE	L	PT MALUKU UTARA
10	BUDI SETIAWAN, S.H. NIP. 19771202 200312 1 001	IV/a	HAKIM PN TERNATE	L	PT MALUKU UTARA
11	KADAR NOH, S.H. NIP. 19770510 200704 1 001	III/d	HAKIM PN TERNATE	L	PT MALUKU UTARA
12	ULFA RERY, S.H. NIP. 19810915 200704 2 001	III/d	HAKIM PN TERNATE	P	PT MALUKU UTARA
13	KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H.,M.H. NIP. 19831014 200704 2 001	III/d	HAKIM PN TERNATE	P	PT MALUKU UTARA
14	IRWAN HAMID, S.H.,M.H. NIP. 19810425 200704 1 001	III/d	HAKIM PN TERNATE	L	PT MALUKU UTARA
15	SURTIYONO, S.H., M.H. NIP. 19800326 200212 1 002	IV/a	KETUA PN SOA SIO	L	PT MALUKU UTARA
16	UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H. NIP. 19860329 201712 1 001	III/b	HAKIM PN SOA SIO	L	PT MALUKU UTARA
17	ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H. NIP. 19940203 201712 2 003	III/b	HAKIM PN SOA SIO	P	PT MALUKU UTARA
18	MADE RIYALDI, S.H., M.Kn. NIP. 19901008 201712 1 002	III/b	HAKIM PN SOA SIO	L	PT MALUKU UTARA
19	ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H. NIP. 19940830 201712 2 002	III/a	HAKIM PN SOA SIO	P	PT MALUKU UTARA
20	ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H. NIP. NIP. 19790604 200212 2 006	IV/a	KETUA PN LABUHA	P	PT MALUKU UTARA
21	MANGULUANG, S.H., M.Kn. NIP. 19901107 201712 1 005	III/b	HAKIM PN LABUHA	L	PT MALUKU UTARA

22	GALANG ADHE SUKMA, S.H. NIP. 19950220 201802 1 001	III/a	HAKIM PN LABUHA	L	PT MALUKU UTARA
23	I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H.,M.H. NIP. 19770116 200212 1 003	IV/a	KETUA PN TOBELO	L	PT MALUKU UTARA
24	MOHAMMAD SALIM HAFIDI, S.H. NIP. 19940626 201712 1 004	III/a	HAKIM PN TOBELO	L	PT MALUKU UTARA
25	HENDRA WAHYUDI, S.H. NIP. 19890523 201712 1 002	III/a	HAKIM PN TOBELO	L	PT MALUKU UTARA
26	SUHENDRA SAPUTRA, S.H., M.H. NIP. 19720915 200502 1 001	IV/a	WAKIL PN BOBONG	L	PT MALUKU UTARA
27	PANUSUNAN, S.H. NIP. 19950212 201712 1 005	III/a	HAKIM PN BOBONG	L	PT MALUKU UTARA
28	FIKRAN WARNANGAN, S.H. NIP. 19941215 201712 1 007	III/a	HAKIM PN BOBONG	L	PT MALUKU UTARA
29	HERMAN, S.H. NIP. 19910510 201712 1 007	III/a	HAKIM PN BOBONG	L	PT MALUKU UTARA
30	DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H. NIP. 19790127 200312 1 001	IV/a	KETUA PN SANANA	L	PT MALUKU UTARA
31	IQBAL SALEH SYAHRONI, S.H., M.Kn. NIP. 19880418 201712 1 004	III/b	HAKIM PN SANANA	L	PT MALUKU UTARA
32	AUFARRIZA MUHAMMAD, S.H., M.H. NIP. 19931201 201712 1 002	III/b	HAKIM PN SANANA	L	PT MALUKU UTARA
33	MUHAMMAD FADLULLAH, S.H. NIP. 19880307 201712 1 001	III/a	HAKIM PN SANANA	L	PT MALUKU UTARA
34	KEITEL VON EMSTER, SH NIP. 19620202 198603 1 006	IV/c	PANITERA PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU
35	ABDUL KADWIN, SH NIP. 19651231 198503 1 022	III/d	PANMUD PIDANA PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU
36	MUHAMMAD IKBAL DAUD, SH NIP. 19670513 198803 1 005	III/d	PANMUD HUKUM PT MALUKU UTARA	L	PT MALUKU
37	ROSE L. SAINAWAL, S.AP NIP. 19640406 198303 2 001	IV/a	PANITERA PN TERNATE	P	PT MALUKU
38	HERLINA HERMANSYAH, SH NIP. 19800720 200704 2 001	III/d	PANMUD PIDANA PN TERNATE	P	PT MALUKU
39	JANNE JU, SH NIP. 19670605 198903 2 004	III/d	PANMUD PERDATA PN TERNATE	P	PT MALUKU
40	JEFRI PRATAMA, SH., MH NIP. NIP. 19840815 200604 1 002	III/c	PANMUD HUKUM PN TERNATE	L	PT MALUKU
41	SUMARTINI WARDIO NIP. NIP. 19631231 198303 2 010	III/c	PANMUD TIPIKOR PN TERNATE	P	PT MALUKU
42	YASIN UMAGAPI, SH NIP. 19701110 199303 1 004	III/d	PANITERA PN SOA SIO	L	PT MALUKU
43	FAHRUDIN PORA, SH NIP. 19780611 200801 1 010	III/d	PANMUD PIDANA PN SOA SIO	L	PT MALUKU
44	SISWADI, SH NIP. 19830129 200912 1 004	III/b	PANMUD HUKUM PN SOA SIO	L	PT MALUKU
45	KHARIS M. HARISUN, SH NIP. 19720823 200604 1 002	III/d	PANITERA PN TOBELO	L	PT MALUKU
46	MOHTAR SOUWAKIL, SH NIP. 19701025 199303 1 003	III/b	PANMUD PIDANA PN TOBELO	L	PT MALUKU

47	USMAN SOLISA,S.AP NIP. 19620722 198803 1 002	III/d	PANITERA PN LABUHA	L	PT MALUKU
48	SALEMAN LATUPONO, SH NIP. 19830515 200912 1 003	III/c	PANMUD PIDANA PN LABUHA	L	PT MALUKU
49	MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, SH NIP. 19810418 200904 1 008	III/d	PANITERA PN SANANA	L	PT MALUKU
50	ISRAMAN AMANTO, SH NIP. 19890317 200904 1 001	III/b	PANMUD HUKUM PN SANANA	L	PT MALUKU
51	ABD. SAMAD MA'BUD, SH NIP. 19700405 199203 1 004	III/d	PANITERA PN BOBONG	L	PT MALUKU
52	MUHAMMAD ICHSAN SADAR ALAM, SH NIP. 19780308 201212 1 005	III/c	PANMUD PIDANA PN BOBONG	L	PT MALUKU
53			KEJAKSAAN TERNATE		KEJAKSAAN TERNATE
54			KEJAKSAAN TERNATE		KEJAKSAAN TERNATE
55			POLRESTA TERNATE		POLRESTA TERNATE
56			POLRESTA TERNATE		POLRESTA TERNATE



Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

[Signature]
BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

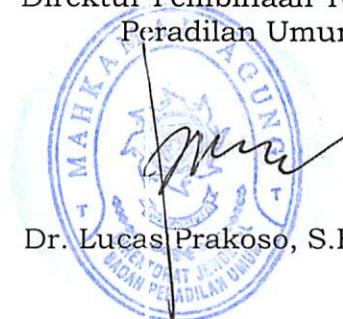
JADWAL ACARA
BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
 Sahid Bela Hotel Jl. Jati Raya No. 500, Jati, Kec. Ternate Selatan,
 Kota Ternate, Maluku Utara

NO.	HARI / TANGGAL WAKTU	ACARA	KETERANGAN
1.	Selasa, 7 Juni 2022	<i>Berpakaian Batik</i>	KETERANGAN
	14.00 – 17.00 17.30 - 19.00 19.30 - 21.30 21.30 – 21.45	Check in dan Registrasi ISHOMA/Makan Malam Acara Pembukaan : a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Hymne MA c. Pembacaan Do'a d. Laporan penyelenggara e. Sambutan, Pembukaan dan Pembinaan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum <i>Coffee Break</i>	Penyelenggara/Panitia Pembawa Acara Seluruh Hadirin Peserta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2.	Rabu, 8 Juni 2022	<i>Berpakaian Dinas Harian</i>	KETERANGAN
	06.00 – 07.30 07.30 – 08.00 08.00 – 10.00 10.00 – 10.15 10.15 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 15.15 15.15 – 17.30 17.30 – 19.00 19.00 – 21.00	Sarapan Absen daftar hadir peserta Perkembangan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam penegakan hukum di Indonesia <i>Coffee Break</i> Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam tahap penyelidikan menurut perspektif Kepolisian. ISHOMA/Makan Siang Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada tahap penuntutan menurut Penuntut Umum <i>Coffee Break</i> Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum Makan Malam Lanjutan Simulasi Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum.	Penyelenggara Penyelenggara/Panitia - Wakil Direktur Sekolah kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia. - Kepolisian Resort Ternate. - Jaksa pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum. - Kepolisian Resort Ternate - Wakil Ketua Tinggi PT. Padang. - Kepolisian Resort Ternate - Wakil Ketua Tinggi PT. Padang. - Jaksa pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

3.	Kamis, 9 Juni 2022	<i>Berpakaian Dinas Harian</i>	KETERANGAN
	06.00 – 07.30 07.30 – 08.00 08.00 – 10.00 10.00 – Selesai	Sarapan Absen daftar hadir peserta Ulasan Penyelesaian Perkara Pidana dalam Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum. Acara Penutupan: a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri c. Sambutan dan Penutupan Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum d. Doa e. Pembagian Sertifikat	Penyelenggara/Panitia Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Pembawa Acara Peserta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Panitia

Jakarta, 12 Mei 2022.

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum



Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

HARAP DI ISI DAN DISERAHKAN
KEPADA PANITIA PADA SAAT
REGISTRASI DAN CHECK IN

BIODATA PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
Sahid Bela Hotel Jl. Jati Raya No. 500, Jati, Kec. Ternate Selatan,
Kota Ternate, Maluku Utara

NAMA LENGKAP	:(nama dan gelar tulis yang benar)						
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:, <table border="1"><tr><td>Tanggal</td><td>Bulan</td><td>Tahun</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	Tanggal	Bulan	Tahun	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tanggal	Bulan	Tahun						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN						
PENDIDIKAN TERAKHIR	:						
JABATAN	:						
PANGKAT-GOL/RUANG	:						
NIP	:						
EMAIL / GMAIL	:						
NO HANDPHONE	:						
SATUAN KERJA	:	Pengadilan Tinggi / Negeri						
ALAMAT KANTOR	: TELEPON: FAX:						

....., Mei 2022
Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara
Berbasis Keadilan Restoratif

(.....)